



Mendagri Segera Tetapkan APBD DKI

Polisi Mulai Memeriksa Pejabat DKI Terkait Pengadaan UPS

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri memastikan penetapan APBD DKI Jakarta paling lambat 8 Maret 2015. Pembangunan diharapkan segera terlaksana dan pelayanan publik tak terganggu kekisruhan seputar APBD tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (4/3), menyampaikan, target penetapan APBD DKI Jakarta sesuai dengan kerangka kerja adalah 8 Maret 2015. "Target kami 8 Maret harus disetujui, apa pun yang terjadi. Kami menghargai proses politik yang ditempuh DPRD DKI dengan angket serta proses hukum yang ditempuh Gubernur DKI ke KPK," kata Tjahjo dalam rapat evaluasi atas Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Tjahjo menambahkan, Kemendagri telah menerima dan mengevaluasi draf APBD yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI. Pihaknya juga telah beberapa kali bertemu dengan DPRD DKI. Namun, belum ada titik temu soal substansi APBD.

"Kemendagri hanya ingin melaksanakan tugas administrasi keuangan. Semua daerah sama, hanya DKI agak terhambat, belum selesai secara administrasi karena beda pemahaman. Namun, APBD jangan sampai tersandera karena akan membuat marah warga DKI," tutur Tjahjo.

Sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 314 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri bisa membatalkan semua atau sebagian isi APBD jika hasil evaluasi Kemendagri tidak ditindaklanjuti Gubernur dan DPRD dalam waktu tujuh hari.

Apabila Mendagri memutuskan membatalkan semua isi APBD 2015, yang berlaku adalah APBD 2014.

"Jika tidak tercapai kesepakatan, tentu harus ada keputusan politik. Namun, penggunaan kewenangan itu menjadi solusi terakhir supaya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di DKI Jakarta tak terhambat," ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di sela-sela proses mediasi Pemprov dan DPRD DKI di Kemendagri.

Reydonnyzar menambahkan, proses evaluasi APBD oleh Kemendagri dibatasi waktu 15 hari. Menurut dia, saat ini tinggal tersisa sepekan untuk menuntaskan evaluasi tersebut.

Proses mediasi yang digelar Kemendagri dilaksanakan dua hari, yakni Rabu dan Kamis ini. Pada mediasi hari pertama, tim Kemendagri terlebih dahulu bertemu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Siang harinya, giliran DPRD DKI Jakarta yang bertemu tim Kemendagri.

Proses mediasi hari pertama itu berlangsung tertutup. Pada proses mediasi hari ini, Kemendagri akan mempertemukan langsung kedua pihak, yaitu Gubernur dan DPRD DKI Jakarta.

"E-budgeting"

Sesuai rapat mediasi itu, Gubernur Basuki menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri yang menanggapi positif pemakaian sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*) untuk APBD DKI Jakarta mulai tahun ini. Sistem itu dinilai efektif mencegah kebocoran anggaran, sekaligus menjabarkan penggunaannya lebih jelas dan terukur.

Basuki menyatakan tidak akan mundur untuk memperjuangkan penghapusan Rp 12,1 triliun "anggaran siluman" dalam RAPBD 2015 versi DPRD. Menurut dia, pola menyusupkan mata anggaran yang tak perlu

terus berulang sejak 2012.

Pengajar dan aktivis anti korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, berpendapat, terobosan *e-budgeting* merupakan langkah maju dalam upaya mengamankan keuangan daerah atau negara. Pola serupa seharusnya ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengefektifkan penggunaan anggaran.

Tidak beralasan

Dalam diskusi kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu, anggota DPD, AM Fatwa, berpendapat, hak angket yang digunakan DPRD DKI saat ini tidak beralasan.

"Saya melihat Gubernur DKI masih mendapat dukungan dari warga Jakarta, bahkan saat ini dukungannya kian besar. Hak angket itu dilakukan jika pemerintah tidak lagi mendapat dukungan warganya. Jadi, saya kira hak angket ini tidak beralasan," kata Fatwa.

Menurut Fatwa, jika komunikasi tak berhasil mencapai titik temu, ia mengusulkan pelaksanaan uji publik.

Hal yang sama dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Soal hak angket, itu kan untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah yang strategis dan dianggap berdampak luas kepada masyarakat. Kita kembali kepada Gubernur DKI Jakarta, apakah dia membuat kebijakan yang merugikan? Kan tidak? Jadi tidak layak jika hal seperti ini diselesaikan dengan angket," tutur Refly.

Fatwa dan Refly mengatakan, Indonesia butuh orang berani seperti Basuki. Mereka juga melihat tak ada tendensi soal uang ataupun jabatan dari apa yang dilakukan Basuki.

Sebaliknya, DPRD DKI menyatakan, panitia angket akan tetap bekerja menyelidiki dokumen APBD yang diserahkan Gubernur. Menurut Wakil Ketua



DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kerja panitia angket akan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Kami sudah menemukan fakta hukumnya, yaitu (Gubernur) melanggar etika dan norma, melanggar stabilitas politik, menghina, memfitnah, dan memalsukan APBD," ujar Lunggana.

DPRD DKI, melalui pengacara Razman Arif Nasution, juga menegaskan akan melaporkan Gubernur DKI kepada Polri dan KPK karena dianggap melanggar sejumlah hal. Selain soal pelanggaran etika, Basuki akan dilaporkan kepada Polri karena dinilai mencemarkan nama baik dan memalsukan dokumen APBD. Basuki juga dituduh akan menyuap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Pejabat diperiksa

Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga Rabu malam masih memeriksa enam pejabat di lingkungan Pemprov DKI terkait pengadaan alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS) di Dinas Pendidikan DKI tahun 2014.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mudjiono mengatakan, tim penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi telah memeriksa AU, pejabat di Seksi Prasarana dan Sarana Kota Jakarta Selatan.

Selain AU, polisi juga meminta keterangan dari 2 kepala sekolah di Jakarta Barat, 2 kepala sekolah di Jakarta Selatan, serta 1 pegawai di Suku Dinas Pengadaan Barang dan Sarana Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul menjelaskan, polisi melakukan penyelidikan soal ini setelah memantau pemberitaan terkait kisruh APBD di media massa dan mendapat laporan khusus dari seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya.

(MKN/APA/REN/
WIN/RTS/B09)